



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang.go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2025**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang.go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

**PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TRIWULAN I**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi s.d. Triwulan I			Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Realisasi		Capaian (%)	
					%		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{3}{3}$	100	100	3 perkara diselesaikan tepat waktu dari 3 perkara yang diselesaikan. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar tidak ada perkara yang melewati batas waktu penyelesaian perkara, yakni 5 bulan untuk pengadilan tingkat pertama.
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{1}{3}$	33,33	95,22	Dari total 3 perkara yang diselesaikan, 2 perkara mengajukan banding, sedangkan untuk kasasi belum ada, sehingga nilai realisasi perkara yang tidak mengajukan banding dan kasasi adalah 33,33% dan capaian 95,22%. Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi untuk mencapai target yang telah direncanakan.
3.		Index Persepsi Pencari Keadilan	90		97,01	107,78	Nilai capaian indeks kepuasan Triwulan I sangat baik. Ketua dan segenap aparatur



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang.go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

		Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					pengadilan berusaha memberikan layanan terbaik, baik dari segi kepaniteraan maupun dari sisi kesekretariatan untuk dukungan sarana dan prasarana.
4.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	$\frac{3}{3}$	100	100	Ketua dan Panitera selalu melakukan evaluasi agar semua salinan putusan perkara yang disampaikan selalu tepat waktu, yakni 14 hari sejak perkara diputus.
5.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	$\frac{0}{0}$	N/A	N/A	Belum ada pendaftaran perkara prodeo sampai dengan Bulan MARET 2025, namun Ketua selalu melakukan monitoring dan mendorong Kepaniteraan untuk menggalakkan sosialisasi pembebasan biaya perkara, terutama melalui Posbankum.
6.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	$\frac{24}{24}$	100	100	Panitera dan Panitera Muda Hukum selalu melakukan monitoring terhadap layanan Posbankum sehingga semua permohonan layanan hukum selalu ditindaklanjuti dengan baik.
7.	Meningkatnya	Persentase	100	$\frac{0}{0}$	N/A	N/A	Sampai dengan Bulan MARET, tidak ada perkara BHT yang dimohonkan eksekusi.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang.go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)		0			Ketua dan Panitera selalu melakukan monitoring agar permohonan eksekusi segera ditindaklanjuti.
Rata-rata Total		93,75			100,33	

Perhitungan Capaian Kinerja s/d Triwulan I Tahun 2025:

➤ Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	: 101 %
➤ Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	: 100 %
➤ Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	: 100 %
➤ <u>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</u>	<u>: N/A</u>
Rata-Rata	: 100,33%



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

PENJELASAN

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

1. Indikator : Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu

Indikator ini mengukur perkara yang diselesaikan tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	100	$\frac{3}{3}$	100	100(%)

- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 perkara dari total 2 perkara yang diselesaikan di Bulan MARET 2025.
- Perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu **sampai dengan** Triwulan I 2025 sebanyak 3 perkara dari total 3 perkara yang telah diselesaikan/diputus. Realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 100%.

2. Indikator : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Indikator ini mengukur Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	35	$\frac{1}{3}$	33,33	95,22(%)

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi pada bulan MARET 2025 sebanyak 1 perkara dari total 2



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

perkara yang putus di Bulan MARET 2025.

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi sampai dengan Triwulan I 2025 sebanyak 1 perkara dari total 3 perkara yang putus sampai dengan Triwulan I 2025.
- Realisasi sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 33,33% sehingga capaian kinerja sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 95,22%.

3.Indikator : Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur Nilai Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	97,01	107,78

- Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I sebesar 97,01% sehingga capaiannya sebesar 107,78%.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

4. Indikator : Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator ini mengukur Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100	$\frac{3}{3}$	100 100 %)

- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu pada bulan MARET 2025 sebanyak 2 putusan perkara dari total 2 perkara yang putus di Bulan MARET 2025.
- Jumlah Putusan yang disampaikan tepat waktu sampai dengan Triwulan I 2025 sebanyak 3 putusan perkara dari total 3 perkara yang diselesaikan sampai dengan Triwulan I 2025.
- Realisasi **sampai dengan** Triwulan I 2025 100%, capaian 100%.

5. Indikator : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator ini mengukur jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	$\frac{0}{0}$	N/A N/A(%)

- Pada Bulan MARET 2025, tidak ada pendaftaran perkara prodeo. Realisasi dan capaian kinerja Bulan MARET tidak dapat dihitung (N/A).
- **Sampai dengan** Triwulan I 2025, belum ada perkara prodeo yang didaftarkan, sehingga realisasi dan capaian atas target perkara prodeo yang diselesaikan tidak dapat dihitung (N/A).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

6.Indikator : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini mengukur Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	$\frac{24}{24}$	100% 100 (%)

- Pada bulan MARET 2025 pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 7 layanan dari 7 permohonan bantuan hukum.(Realisasi 100%)
- Realisasi sebesar 100% ini telah sesuai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sebesar 100%.
- Sampai dengan Triwulan I 2025, pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebanyak 24 layanan dari 24 permohonan bantuan hukum. (Realisasi 100%)
- Realisasi sampai dengan bulan Triwulan I 2025 sebesar 100% ini mencapai target (100%) sehingga capaian atas indikator ini sampai dengan Triwulan I 2025 sebesar 100%.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

7.Indikator : Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator ini mengukur Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi) dan capaiannya sebagai berikut :

	Target	Realisasi		Capaian
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100	$\frac{0}{0}$	N/A	N/A(%)

- Pada bulan MARET 2025 tidak ada permohonan Eksekusi maupun Penetapan Eksekusi, sehingga realisasi dan capaian di Bulan MARET 2025 tidak dapat dihitung (N/A). Tidak adanya permohonan eksekusi di bulan berjalan bukan merupakan kesalahan satker, dan bisa disebabkan karena telah adanya eksekusi secara sukarela dari para pihak dan tidak dilaporkan ke pengadilan.
- **Sampai dengan** Triwulan I 2025, belum ada permohonan Eksekusi dan Penetapan Eksekusi.
- Realisasi dan capaian **sampai dengan** Triwulan I 2025 tidak dapat dihitung (N/A).

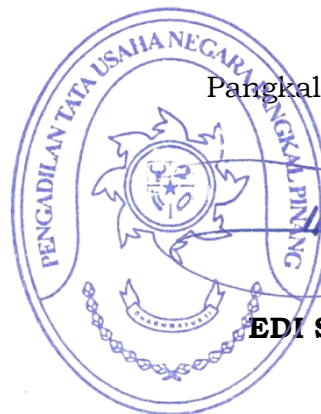


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33684
www.ptun-pangkalpinang@go.id; info@ptun-pangkalpinang.go.id

Penjelasan Target, Realisasi dan Capaian Rata-Rata :

- Target rata-rata 7 Indikator Kinerja yaitu sebesar **93,75%**.
- Dikarenakan beberapa indikator tidak dapat didefinisikan (N/A), maka atas indikator N/A tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan capaian kinerja. Capaian rata-rata Indikator Kinerja yang dapat dihitung **sampai dengan** Triwulan I Tahun 2025 yaitu sebesar **100,33%**.



Pangkalpinang, 8 April 2025
KETUA,

EDI SEPTA SURHAZA